JURNAL ILMIAH INOVASI

Vol. 26, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2527-6220 | P-ISSN : 1411-5549
DOI : 10.25047/jii.v26i02.7209

# Pengaruh dan Minat serta Tata Kelola Pelatihan dalam Pengembangan Sapi Potong Rakyat: Analisis Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sukoharjo

*Influence-Interest Dynamics and Training Governance in Smallholder Beef Cattle Development: A Stakeholder Analysis in Sukoharjo Regency*

**Kharisma Imam Adinata[1]*, Mukh Arifin[2], Limbang Kustiawan Nuswantara[2], dan Endang Purbowati[2]**

[1]Program Doktor Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang
[2]Departemen Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang
* *imamliya90@gmail.com*

**ABSTRAK**

Sektor sapi potong di Indonesia masih didominasi oleh peternak skala kecil dan terus menghadapi persoalan produktivitas serta koordinasi yang bersifat persisten. Intervensi berbasis pelatihan banyak digunakan untuk mengatasi kesenjangan kapasitas, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan sistem penyuluhan dan inovasi dalam menghubungkan aktor, pengetahuan, dan sumber daya. Penelitian ini menganalisis peran pemangku kepentingan serta konfigurasi pengaruh dan minat dalam program pengembangan sapi potong berbasis pelatihan di kabupaten Sukoharjo. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif di Kabupaten Sukoharjo melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan telaah dokumen dengan 19 informan kunci yang mewakili dinas peternakan, penyuluh, peternak, kelompok peternak, pedagang sapi potong, akademisi, dan peneliti. Pemangku kepentingan dinilai menggunakan kerangka minat dan pengaruh tiga tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, kemudian dipetakan ke dalam matriks 3×3 serta dilengkapi dengan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak dan kelompok peternak memiliki minat tinggi tetapi pengaruh rendah, sedangkan dinas pertanian/peternakan Kabupaten Sukoharjo memiliki pengaruh tinggi tetapi minat operasional yang relatif lebih rendah. Penyuluh dan pedagang sapi potong menempati posisi pengaruh sedang, dengan penyuluh berperan sebagai fasilitator utama dan penghubung pengetahuan. Ketimpangan minat dan pengaruh tersebut berisiko membuat desain program lebih banyak digerakkan oleh logika birokrasi dibandingkan kebutuhan adaptif di tingkat usaha ternak. Implikasi kebijakan penelitian ini meliputi perlunya ruang koordinasi lintas aktor dengan aturan dan akuntabilitas yang jelas, penguatan kapasitas penyuluh dalam fasilitasi dan dukungan rantai nilai, serta pengaitan hasil pelatihan dengan mekanisme agregasi dan pasar untuk meningkatkan insentif adopsi yang secara tidak langsung dapat memperbaiki kesejahteraan peternak.

**Kata kunci** — sapi potong; penyuluhan; matriks pengaruh; analisis pemangku kepentingan; tata kelola pelatihan

***ABSTRACT***

*Indonesia's beef cattle sector remains dominated by smallholders and continues to face persistent productivity and coordination challenges. Training-based interventions are widely used to address capability gaps, yet their effectiveness depends on how well advisory and innovation systems connect actors, knowledge, and resources. This study analyses stakeholder roles and power–interest configurations in a training oriented beef cattle development program in Sukoharjo Regency. A qualitative case-study design was applied in Sukoharjo Regency using in depth interviews, focus group discussions, and document review with 19 key informants representing government livestock services, extension officers, farmers, farmer groups, beef cattle traders, academics, and researchers. Stakeholders were assessed using a three-level (low/medium/high) interest influence framework and plotted in a 3×3 matrix, complemented by thematic analysis. Findings show that farmers and farmer groups hold high interest but low influence, while the regencies livestock service has high influence but relatively lower operational interest. Extension officers and traders beef cattle occupy moderate influence positions, with extension officer serving as the main facilitator and knowledge broker. This interest–influence asymmetry risks program designs being driven by bureaucratic logics rather than adaptive farm needs. Policy implications include establishing a cross actor coordination space with clear rules and accountability, strengthening extension guidance capacity for facilitation and value chain support, and linking training outcomes to aggregation and market mechanisms to improve incentives for adoption which indirectly improves farmers welfare.*

***Keywords*** — *beef cattle; extension; influence matrix; stakeholder analysis; training governance*

OPEN ACCESS
© 2026. Kharisma Imam Adinata, Mukh Arifin, Limbang Kustiawan Nuswantara, Endang Purbowati
Creative Commons
Attribution 4.0 International License

## 1. Pendahuluan

Sektor sapi potong di Indonesia masih didominasi oleh peternak skala kecil dan terus menghadapi tantangan produktivitas serta koordinasi, meskipun permintaan daging sapi domestik meningkat dan perhatian kebijakan terhadap sektor ini semakin kuat [1]-[3]. Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, salah satu kabupaten penting penghasil ternak sapi potong di Indonesia, program pengembangan peternakan sering melibatkan banyak aktor, seperti pemerintah, layanan penyuluhan, kelompok tani atau kelompok peternak, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan. Namun, hasil program kerap dibatasi oleh lemahnya koordinasi antaraktor dan pelaksanaan yang terfragmentasi di sepanjang rantai nilai.

Kondisi tersebut menyulitkan penyelarasan insentif, keberlanjutan aksi kolektif setelah siklus proyek berakhir, dan penerjemahan intervensi teknis menjadi perbaikan kinerja yang tahan lama di tingkat usaha ternak maupun wilayah [1]-[3]. Intervensi berbasis pelatihan banyak digunakan untuk menjawab kesenjangan kapasitas dalam produksi, manajemen kesehatan, pemberian pakan, perencanaan usaha, dan pemasaran. Namun, efektivitas pelatihan bergantung pada sejauh mana sistem penyuluhan dan inovasi mampu menghubungkan aktor, pengetahuan, dan sumber daya. Kajian tentang layanan penyuluhan serta pendidikan dan penyuluhan pertanian menunjukkan bahwa penyuluhan kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai transfer teknologi, tetapi juga mencakup fasilitasi, perantaraan pengetahuan, dan negosiasi di antara aktor yang memiliki kepentingan berbeda [4].

Pengaturan kolaborasi multipihak, seperti platform inovasi, dapat mendukung perumusan masalah secara bersama, proses pembelajaran, dan koordinasi. Namun, kinerjanya dipengaruhi oleh pilihan desain, relasi kuasa, dan kelembagaan di dalam sistem yang lebih luas [5]-[7]. Bukti dari tinjauan sistematis mengenai platform multipihak juga menunjukkan bahwa mekanisme ko-kreasi pengetahuan hanya efektif apabila ada kejelasan peran, tata kelola, dan akuntabilitas yang membuat para aktor benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan [8]. Dalam konteks tersebut, analisis pemangku kepentingan penting untuk menentukan aktor yang paling kritis, alasan pentingnya aktor tersebut, serta bagaimana minat dan pengaruh mereka membentuk implementasi, terutama dalam program pelatihan yang dimaksudkan untuk menghubungkan aktor hulu dan hilir serta memperbaiki koordinasi [9].

Perkembangan metodologis terbaru juga memberi penekanan lebih kuat pada metrik pemangku kepentingan yang bersifat operasional dan relevan bagi kebijakan, sementara pendekatan pemetaan terapan menawarkan prosedur yang terstruktur untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan menjelaskan atribut yang relevan bagi keterlibatan serta pengambilan keputusan [10], [11]. Dalam konteks kolaborasi peternakan, pendekatan partisipatif juga telah digunakan untuk memperkuat koordinasi dan kualitas kemitraan dalam kesehatan hewan serta penyediaan layanan [12]. Berdasarkan bukti tersebut, penelitian ini memetakan peran dan relasi pemangku kepentingan serta menilai konfigurasi minat dan pengaruh yang membentuk pengembangan peternakan berbasis pelatihan di Kabupaten Sukoharjo.

## 2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi sistem pengembangan peternakan yang terbatas secara konteks dan berlangsung dalam rentang waktu tertentu melalui bukti yang kaya, kontekstual, dan bersumber dari beberapa jenis data [13]. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, karena merupakan lokasi pengembangan sapi berdasarkan keputusan pengembangan kawasan pertanian nasional dari Kementerian Pertanian [14]. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2025.

Data primer berasal dari tiga sumber utama, yaitu wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), dan dokumentasi lapangan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan sapi potong berbasis pelatihan pada kegiatan hulu dan hilir. Pedoman wawancara tidak digunakan sebagai naskah yang kaku, tetapi sebagai alat kerja. Pedoman tersebut

disusun berdasarkan telaah awal literatur, lalu dipertajam secara bertahap ketika temuan lapangan menunjukkan isu yang membutuhkan pertanyaan lebih jelas dan eksplorasi lebih dalam, terutama terkait cara pelatihan dilaksanakan dan hal yang benar-benar dapat dihasilkan dari pelatihan tersebut.

Informan direkrut secara purposif agar partisipasi berfokus pada individu yang mampu memberikan informasi kaya, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian [15]. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 19 informan kunci, yang terdiri atas pejabat dinas peternakan kabupaten, penyuluh, peternak, perwakilan kelompok atau komunitas peternak, pedagang, akademisi, dan peneliti. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Pertanyaan inti digunakan untuk memandu setiap sesi, sedangkan pertanyaan lanjutan digunakan untuk menelusuri tema yang muncul, mengklarifikasi ketidakkonsistenan, dan menangkap rincian yang muncul selama percakapan [16], [17].

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, dan rencana strategis terkait lainnya. Data tersebut dilengkapi dengan literatur akademik dan laporan kelembagaan. Dokumen dianalisis menggunakan prosedur telaah kualitatif terstruktur untuk memperkuat triangulasi lintas sumber data [18].

Prosedur etik menekankan persetujuan berdasarkan informasi, kerahasiaan, dan anonimisasi sesuai dengan praktik baik dalam penelitian kebijakan kualitatif [19]. Analisis data menggunakan analisis pemangku kepentingan untuk menelaah peran, relasi, serta konfigurasi pengaruh dan minat aktor dalam program pengembangan peternakan berbasis pelatihan. Dengan mengacu pada panduan analisis pemangku kepentingan terapan yang mengoperasionalkan konsep minat dan pengaruh atau kekuasaan dalam penelitian implementasi kebijakan (Balane et al., 2020), setiap aktor dinilai pada tiga tingkat minat dan pengaruh, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hasil penilaian kemudian dipetakan ke dalam matriks minat dan pengaruh 3×3 atau sembilan kuadran untuk memandu prioritas keterlibatan [10], [11].

Tabel 1. Matriks pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat minat dan tingkat pengaruh.

| Tingkat Minat | Pengaruh Rendah | Pengaruh Sedang | Pengaruh Tinggi |
|---|---|---|---|
| **Minat Tinggi** | Kuadran 3 | Kuadran 6 | Kuadran 9 |
| **Minat Sedang** | Kuadran 2 | Kuadran 5 | Kuadran 8 |
| **Minat Rendah** | Kuadran 1 | Kuadran 4 | Kuadran 7 |

*Sumber : Data Primer Terolah, (2025)*

Transkrip kualitatif dan catatan FGD dikodekan serta disintesis menggunakan prosedur analisis tematik untuk mengidentifikasi pola berulang yang relevan dengan koordinasi, tata kelola pelatihan, dan hambatan implementasi [20]. Kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu wawancara, FGD, dan dokumen, pemeriksaan silang secara iteratif, serta dokumentasi analitis yang transparan [21].

## 3. Pembahasan

Peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan atau program dibentuk oleh tingkat kekuasaan dan minat relatif mereka [11]. Dalam proses perencanaan pengembangan peternakan melalui peningkatan pengetahuan tentang produksi di tingkat usaha ternak dan praktik pascapanen, khususnya pada sektor sapi potong di tingkat nasional maupun daerah, banyak aktor terlibat dengan minat langsung maupun tidak langsung terhadap program yang direncanakan. Para aktor tersebut juga memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan tingkat pengaruh yang berbeda dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan. Berdasarkan identifikasi aktor, kategori, dan perannya, minat dan pengaruh pemangku kepentingan dalam program pengembangan sapi potong berbasis pelatihan dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 2. Minat dan peran pemangku kepentingan dalam program pengembangan sapi potong berbasis pelatihan.

| Aktor | Minat | Peran/Kekuatan |
|---|---|---|
| Dinas Pertanian/Peternakan Kabupaten Sukoharjo | Mencapai target kinerja pengembangan sektor sapi potong melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan. | Melakukan pembinaan, supervisi, dan pemantauan untuk mendukung peternak sapi potong dan kelompok peternak. |
| Penyuluh Pertanian Kabupaten Sukoharjo | Mencapai target kinerja lapangan dalam diseminasi hasil penelitian atau inovasi pada produksi dan pascapanen sapi potong. | Berperan sebagai fasilitator dan instruktur utama, mengakses materi terbaru dari peneliti dan dosen, serta bekerja sama untuk mendiseminasikan materi pelatihan kepada peternak. |
| Peternak sapi potong | Meningkatkan pendapatan melalui penerapan materi pelatihan pada produksi dan pascapanen. | Menjadi penerima utama program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. |
| Kelompok/komunitas peternak sapi potong | Meningkatkan pendapatan dan memperkuat kelembagaan peternak melalui program pelatihan. | Mengkoordinasikan peternak agar aktif mendukung dan mengikuti kegiatan pelatihan. |
| Pedagang/penjual sapi potong | Menyerap dan memasarkan sapi potong yang dihasilkan peternak. | Membeli dan menyalurkan hasil produksi peternak serta hasil penanganan pascapanen. |
| Dosen | Mencapai tujuan pemberdayaan peternak melalui pelatihan | Menyampaikan materi pelatihan tentang produksi dan pascapanen. |
| Peneliti | Mencapai luaran inovasi dan penelitian terkait produksi serta pascapanen sapi potong. | Mendiseminasikan hasil penelitian tentang produksi dan pascapanen kepada penyuluh. |

*Sumber : Data Primer Terolah, (2025)*

## Pemetaan Minat dan Pengaruh

Mengacu pada Tabel 2, distribusi minat pemangku kepentingan dalam kegiatan pelatihan sapi potong dapat dijelaskan melalui matriks minat dan pengaruh yang disajikan pada Tabel 3. Dari sisi minat, peternak sapi potong dan kelompok peternak atau gabungan kelompok tani berada pada tingkat minat tinggi, pedagang dan penyuluh berada pada tingkat minat sedang, sedangkan peneliti, dosen, dan dinas pertanian/peternakan di Kabupaten Sukoharjo berada pada tingkat minat rendah.

Tabel 3. Matriks minat dan pengaruh pemangku kepentingan dalam program pengembangan sapi potong berbasis pelatihan.

| | Pengaruh Rendah | Pengaruh Sedang | Pengaruh Tinggi |
|---|---|---|---|
| **Minat Tinggi** | Peternak sapi potong | Kelompok/komunitas peternak sapi potong | |
| **Minat Sedang** | | Pedagang sapi potong; Penyuluh Kabupaten Sukoharjo | |
| **Minat Rendah** | Peneliti; Dosen | | Dinas Pertanian/Peternakan Kabupaten Sukoharjo |

*Sumber : Data Primer Terolah, (2025)*

## Minat dan Pengaruh serta Tata Kelola Pelatihan

Pemetaan pemangku kepentingan menunjukkan adanya asimetri minat dan pengaruh yang jelas. Peternak sapi potong sebagai pihak yang memiliki kepentingan paling tinggi terhadap program cenderung memiliki

pengaruh rendah, sedangkan dinas pertanian/peternakan kabupaten memiliki pengaruh tinggi tetapi minat operasional yang lebih terbatas. Konfigurasi ini menimbulkan risiko bahwa desain pelatihan, alokasi sumber daya, dan indikator kinerja lebih banyak digerakkan oleh logika program birokratis daripada kebutuhan adaptif di tingkat usaha ternak. Literatur tentang platform inovasi menunjukkan bahwa hasil pelatihan lebih mungkin bertahan melampaui siklus proyek apabila tersedia ruang koordinasi lintas aktor yang jelas, aturan keterlibatan bersama, dan mekanisme pembelajaran serta umpan balik yang memungkinkan aktor berminat tinggi ikut membentuk keputusan [7]. Selain itu, perubahan kelembagaan melalui platform kolaboratif sangat bergantung pada kemampuan platform untuk menurunkan biaya koordinasi sekaligus membangun legitimasi dan komitmen di antara aktor kunci, sehingga ketimpangan minat dan pengaruh tidak terus direproduksi [22].

**Penyuluh sebagai Penghubung Pengetahuan dan Fasilitator**

Temuan bahwa penyuluh menempati posisi pengaruh sedang sekaligus berperan sebagai jembatan antara dinas pertanian/peternakan, produsen pengetahuan seperti dosen dan peneliti, serta peternak menunjukkan peran strategis penyuluh sebagai penghubung pengetahuan. Ketika sistem pertanian semakin beragam dan dinamis, penyuluhan tidak dapat direduksi hanya menjadi kegiatan penyampaian teknologi. Penyuluhan juga mencakup fasilitasi proses, negosiasi berbagai kepentingan, dan penguatan tata kelola agar intervensi lebih responsif terhadap peternak dan pengguna akhir lainnya [4].

Kajian terbaru menunjukkan bahwa teknologi dan digitalisasi mendorong penyuluhan masuk ke peran yang lebih luas, seperti integrasi pengetahuan, koordinasi dengan aktor baru, dan dukungan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, jika dukungan kelembagaan lemah, perluasan peran ini dapat berubah menjadi layanan yang semakin komersial dan kurang terjangkau bagi kelompok yang kurang beruntung [23]. Karena itu, penguatan kapasitas penyuluh dalam fasilitasi, analisis rantai nilai, dan evaluasi berbasis hasil menjadi prasyarat agar pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan episodik.

**Dinamika Pasar dan Inklusi Peternak Skala Kecil**

Posisi pedagang dengan minat sedang dan pengaruh sedang menunjukkan bahwa dinamika pasar dan asimetri informasi, seperti harga, standar mutu, dan akses pembeli, turut membentuk insentif peternak untuk mengadopsi hasil pelatihan. Literatur tentang rantai nilai inklusif menunjukkan bahwa keterlibatan peternak kecil secara berkelanjutan dalam rantai nilai bergantung pada tiga hal, yaitu informasi yang transparan, persyaratan mutu yang disepakati, serta mekanisme yang membagi risiko dan keuntungan secara lebih adil di antara aktor [24].

Penelitian tentang inklusi petani atau peternak kecil berulang kali menunjukkan bahwa pelatihan saja jarang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan. Manfaat nyata biasanya muncul ketika peningkatan kapasitas disertai dengan perubahan pengaturan pasar, akses yang lebih mudah terhadap layanan kunci, dan penguatan daya tawar kolektif melalui organisasi peternak [25]. Implikasi utamanya adalah pelatihan tidak boleh berdiri sendiri. Pelatihan perlu dikaitkan dengan mekanisme agregasi melalui kelompok peternak, misalnya grading, penjualan berbasis kontrak, atau kerja sama dengan mitra hilir, sehingga perbaikan teknis diikuti oleh kondisi perdagangan yang lebih baik.

## 4. Kesimpulan

Pemetaan pemangku kepentingan menunjukkan adanya kesenjangan minat dan pengaruh dalam pengembangan sapi potong berbasis pelatihan di Kabupaten Sukoharjo. Peternak dan kelompok peternak memiliki kepentingan tinggi terhadap hasil program, tetapi hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap desain program dan sumber daya. Sebaliknya, dinas peternakan provinsi memiliki pengaruh yang lebih kuat. Jika konfigurasi ini tidak ditangani, program dapat menjadi kurang relevan dengan realitas usaha ternak, adopsi dapat melambat, dan dampak program dapat melemah setelah periode proyek berakhir. Oleh karena itu, perbaikan hasil memerlukan mekanisme koordinasi lintas aktor

yang memberi peran nyata kepada aktor berminat tinggi dalam penetapan agenda, memperjelas aturan keterlibatan, dan menindaklanjuti hasil, bukan hanya berfokus pada partisipasi.

Layanan penyuluhan perlu diperkuat sebagai fasilitator dan penghubung pengetahuan, termasuk melalui peningkatan keterampilan fasilitasi kelompok, monitoring dan evaluasi, serta analisis rantai nilai. Selain itu, pelatihan tidak boleh berdiri sendiri. Pelatihan perlu dihubungkan dengan instrumen berorientasi pasar, seperti grading dan pemasaran, yang disalurkan melalui kelompok peternak untuk mengurangi kesenjangan informasi dan membuat perubahan praktik menjadi lebih menarik. Penelitian mendatang dapat memperkuat pemetaan kualitatif ini dengan menambahkan analisis skor pemangku kepentingan secara kuantitatif, sehingga jalur pengaruh dan kinerja kolaborasi dapat diuji secara lebih terukur.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini melalui pendanaan penelitian. Dukungan dana tersebut memungkinkan penulis menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan naskah ilmiah.

## 6. Daftar Pustaka

[1] A. Agus and T. S. M. Widi, "Current situation and future prospects for beef cattle production in Indonesia—A review," Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, vol. 31, no. 7, pp. 976–983, 2018. doi: 10.5713/ajas.18.0233.

[2] Z. Asikin, D. Baker, R. Villano, and A. Daryanto, "Business models and innovation in the Indonesian smallholder beef value chain," Sustainability, vol. 12, no. 17, Art. no. 7020, 2020. doi: 10.3390/su12177020.

[3] E. Valerio, N. Hilmiati, J. Prior, and D. Dahlanuddin, "Analysis of the agricultural innovation system in Indonesia: A case study of the beef sector in Nusa Tenggara Barat," Agricultural Systems, vol. 203, Art. no. 103529, 2022. doi: 10.1016/j.agsy.2022.103529.

[4] L. Klerkx, "Advisory services and transformation, plurality and disruption of agriculture and food systems: Towards a new research agenda for agricultural education and extension studies," The Journal of Agricultural Education and Extension, vol. 26, no. 2, pp. 131–140, 2020. doi: 10.1080/1389224X.2020.1738046.

[5] J. Davies, Y. Maru, A. Hall, I. K. Abdourhamane, A. Adegbidi, P. Carberry, K. Dorai, S. A. Ennin, P. M. Etwire, L. McMillan, and A. Njo, "Understanding innovation platform effectiveness through experiences from West and Central Africa," Agricultural Systems, vol. 165, pp. 321-334, 2018. doi: 10.1016/j.agsy.2016.12.014.

[6] M. Schut, L. Klerkx, M. Sartas, D. Lamers, M. McCampbell, I. Ogbonna, P. Kaushik, K. Atta-Krah, and C. Leeuwis, "Innovation platforms: Experiences with their institutional embedding in agricultural research for development," Experimental Agriculture, vol. 52, no. 4, pp. 537–561, 2015. doi: 10.1017/S001447971500023X.

[7] M. Schut, L. Klerkx, J. Rodenburg, J. Kayeke, C. Raboanarielina, L. C. Hinnou, P. Y. Adegbola, A. van Ast, and L. Bastiaans, "Innovation platforms in agricultural research for development: Ex-ante appraisal of the purposes and conditions under which innovation platforms can contribute to agricultural development outcomes," Experimental Agriculture, vol. 55, no. 4, pp. 575–596, 2019. doi: 10.1017/S0014479718000200.

[8] E. Van Ewijk and M. A. F. Ros-Tonen, "The fruits of knowledge co-creation in agriculture and food-related multi-stakeholder platforms in sub-Saharan Africa – A systematic literature review," Agricultural Systems, vol. 186, Art. no. 102949, 2021. doi: 10.1016/j.agsy.2020.102949.

[9] M. A. Balane, B. Palafox, L. M. Palileo-Villanueva, M. McKee, and D. Balabanova, "Enhancing the use of stakeholder analysis for policy implementation research: Towards a novel framing and operationalised measures," BMJ Global Health, vol. 5, no. 11, Art. no. e002661, 2020. doi: 10.1136/bmjgh-2020-002661.

[10] V. Hoare, C. E. Hinson, B. M. Reyniers, R. O'Shea, and C. Howe, "MAPTkit: An environmental management decision-tool for inclusive, equitable and representative stakeholder attribute mapping," Ecological Solutions and Evidence, vol. 4, no. 2, Art. no. e12235, 2023. doi: 10.1002/2688-8319.12235.

[11] S. Raum, "A framework for integrating systematic stakeholder analysis in ecosystem services research: Stakeholder mapping for forest ecosystem services in the UK," Ecosystem Services, vol. 29, pp. 170-184, 2018. doi: 10.1016/j.ecoser.2018.01.001.

[12] M. Poupaud, N. Antoine-Moussiaux, I. Dieuzy-Labaye, and M. Peyre, “An evaluation tool to strengthen the collaborative process of the public-private partnership in the veterinary domain,” PLOS ONE, vol. 16, no. 5, Art. no. e0252103, 2021. doi: 10.1371/journal.pone.0252103.
[13] S. Mtisi, “The qualitative case study research strategy as applied on a rural enterprise development doctoral research project,” International Journal of Qualitative Methods, vol. 21, pp. 1-13, 2022. doi: 10.1177/16094069221145849.
[14] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Keputusan Menteri Pertanian No. 830/Kpts/RC.040/12/2016,” 2016. Kepmentan No. 830/Kpts/RC.040/12/2016 Tahun 2016. (accessed Mei.03,2026).
[15] S. Campbell, M. Greenwood, S. Prior, T. Shearer, K. Walkem, S. Young, D. Bywaters, and K. Walker, “Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples,” Journal of Research in Nursing, vol. 25, no. 8, pp. 652–661, 2020. doi: 10.1177/1744987120927206.
[16] B. Lobe, D. Morgan, and K. A. Hoffman, “Qualitative data collection in an era of social distancing,” International Journal of Qualitative Methods, vol. 19, pp. 1–8, 2020. doi: 10.1177/1609406920937875.
[17] R. Trigueros, “Qualitative and mixed methods in sports and exercise sciences: Guidelines for choosing, designing and reporting,” Journal of Sport and Health Science, vol. 7, no. 2, pp. 253–261, 2018. doi: 10.1016/j.jshs.2017.05.007.
[18] S. L. Dalglish, H. Khalid, and S. A. McMahon, “Document analysis in health policy research: The READ approach,” Health Policy and Planning, vol. 35, no. 10, pp. 1424–1431, 2020. doi: 10.1093/heapol/czaa064.
[19] W. J. Newman, A. A. Ojo, and I. T. Winkler, “Ethical considerations for qualitative research methods during the COVID-19 pandemic and other emergency contexts,” International Journal of Qualitative Methods, vol. 20, pp. 1–12, 2021. doi: 10.1177/16094069211047823.
[20] M. E. Kiger and L. Varpio, “Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131,” Medical Teacher, vol. 42, no. 8, pp. 846–854, 2020. doi: 10.1080/0142159X.2020.1755030.
[21] J. L. Johnson, D. Adkins, and S. Chauvin, “A review of the quality indicators of rigor in qualitative research,” American Journal of Pharmaceutical Education, vol. 84, no. 1, Art. no. 7120, 2020. doi: 10.5688/ajpe7120.
[22] D. Hounkonnou, J. Brouwers, A. Van Huis, J. Jiggins, D. Kossou, N. G. Röling, O. Sakyi-Dawson, and M. Traoré, “Triggering regime change: A comparative analysis of the performance of innovation platforms that attempted to change the institutional context for nine agricultural domains in West Africa,” Agricultural Systems, vol. 165, pp. 296–309, 2018. doi: 10.1016/j.agsy.2016.08.009. doi: 10.3389/fsufs.2025.1542007.
[23] R. Nettle, J. Ingram, and M. Ayre, “Digiwork: How agriculture 4.0 is changing work for farm advisers,” Frontiers in Sustainable Food Systems, vol. 9, Art. no. 1542007, 2025.
[24] M. A. F. Ros-Tonen, V. Bitzer, A. Laven, D. Ollivier de Leth, Y. Van Leynseele, and A. Vos, “Conceptualizing inclusiveness of smallholder value chain integration,” Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 41, pp. 10–17, 2019. doi: 10.1016/j.cosust.2019.08.006.
[25] L. S. O. Liverpool-Tasie, A. Wineman, S. Young, J. Tambo, C. Vargas, T. Reardon, G. S. Adjognon, J. Porciello, N. Gathoni, L. Bizikova, and A. Galiè, “A scoping review of market links between value chain actors and small-scale producers in developing regions,” Nature Sustainability, vol. 3, pp. 799–808, 2020. doi: 10.1038/s41893-020-00621-2.